

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah berakibat produktivitas juga rendah (Kurniawan. D, 2015).

Selain itu, kemiskinan juga dapat terjadi ketika orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, ketika orang sakit tidak mampu membayar perawatan, ketika rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan pekerjaan yang stabil. Dalam kondisi kemiskinan ini, orang miskin diperlakukan dengan buruk dan dieksploitasi hampir di mana-mana, termasuk di pertanian, pabrik, kantor pemerintah, rumah sakit, stasiun kereta api, dll. Ketiadaan sumber daya dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar hidup minimum merupakan definisi kemiskinan. Kemiskinan juga dapat digambarkan sebagai keadaan di mana pendapatan seseorang dari pekerjaan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (Koshale & Kumari, 2023).

Menurut Prima Sukmaraga (2011) dalam Nurhaila (2024), Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Hingga kini, kemiskinan tetap menjadi salah satu masalah pembangunan yang paling rumit di Indonesia karena terkait dengan rendahnya penghasilan masyarakat serta menunjukkan keterbatasan dalam akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur, dan teknologi informasi. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, tingkat kesejahteraan warga belum merata di seluruh daerah. Ketidakmerataan dalam pembangunan antar daerah mengakibatkan masih adanya provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di bagian Timur Indonesia dan daerah yang kurang berkembang lainnya. Situasi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum mampu menjamin pemerataan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan di Indonesia pun bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh berbagai elemen seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, akses teknologi yang terbatas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Satrya & Dewi (2025), menunjukkan bahwa pendidikan, tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat

kemiskinan di Indonesia, di mana rendahnya kualitas pendidikan dan kesempatan kerja yang terbatas menghalangi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan.

Selain mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat, kemiskinan juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Tingginya angka kemiskinan dapat mengarah pada peningkatan pengangguran, tindak kriminal, ketidaksetaraan sosial, kesehatan yang rentan, stunting, putus sekolah, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Jika situasi ini berlanjut, maka akan menghambat pembangunan ekonomi nasional dan menurunkan daya saing Indonesia di era globalisasi dan transformasi digital. Menurut Oktania *et.,al.* (2025), kemiskinan di Indonesia juga sangat berkaitan dengan terbatasnya akses pada sanitasi, kesehatan, dan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin menghadapi bukan hanya keterbatasan ekonomi, tetapi juga tantangan sosial yang lebih luas, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam penanganannya.

Persoalan kemiskinan di Indonesia semakin rumit seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan demografi masyarakat. Dalam era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses informasi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesempatan kerja. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan digital antar daerah di Indonesia, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Rumah tangga yang tidak memiliki akses memadai terhadap telekomunikasi dan internet cenderung mengalami kesulitan untuk mendapatkan

informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, pasar, dan layanan ekonomi digital, yang berpotensi memperbesar risiko terjerat kemiskinan. Riamto & Donoriyanto, (2025) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan akses terhadap teknologi memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. Semakin terbatas akses masyarakat terhadap teknologi dan infrastruktur, maka semakin meningkat pula potensi terjadinya kemiskinan.

Di sisi lain, saat ini Indonesia sedang menghadapi periode bonus demografi yang terlihat dari meningkatnya angka penduduk yang berada di usia produktif. Situasi ini seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun, jika pertambahan jumlah penduduk produktif tidak didukung oleh penyediaan lapangan kerja yang cukup, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi yang optimal, maka keadaan tersebut justru dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan memperburuk keadaan kemiskinan. Holivil (2024) mengungkapkan bahwa ketidakmerataan di bidang kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di bagian timur. Oleh karena itu, pengelolaan jumlah penduduk usia produktif dan distribusi akses telekomunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat dari kondisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan di Indonesia bukan hanya sekadar masalah rendahnya pendapatan masyarakat, melainkan juga merupakan isu pembangunan yang bersifat kompleks, struktural, dan dapat menghambat kemajuan ekonomi nasional jika tidak ditangani dengan serius. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, terutama terkait penggunaan telekomunikasi dalam rumah tangga dan jumlah penduduk usia produktif, sehingga dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, variabel kemiskinan diukur menggunakan indikator penduduk miskin, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Indikator ini dipilih karena mampu mempresentasikan kondisi kesejahteraan rumah tangga secara lebih objektif dan terukur dalam suatu wilayah. Adapun jumlah rata-rata persentase penduduk miskin 38 provinsi di Indonesia periode 2015-2024 seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2015-2024

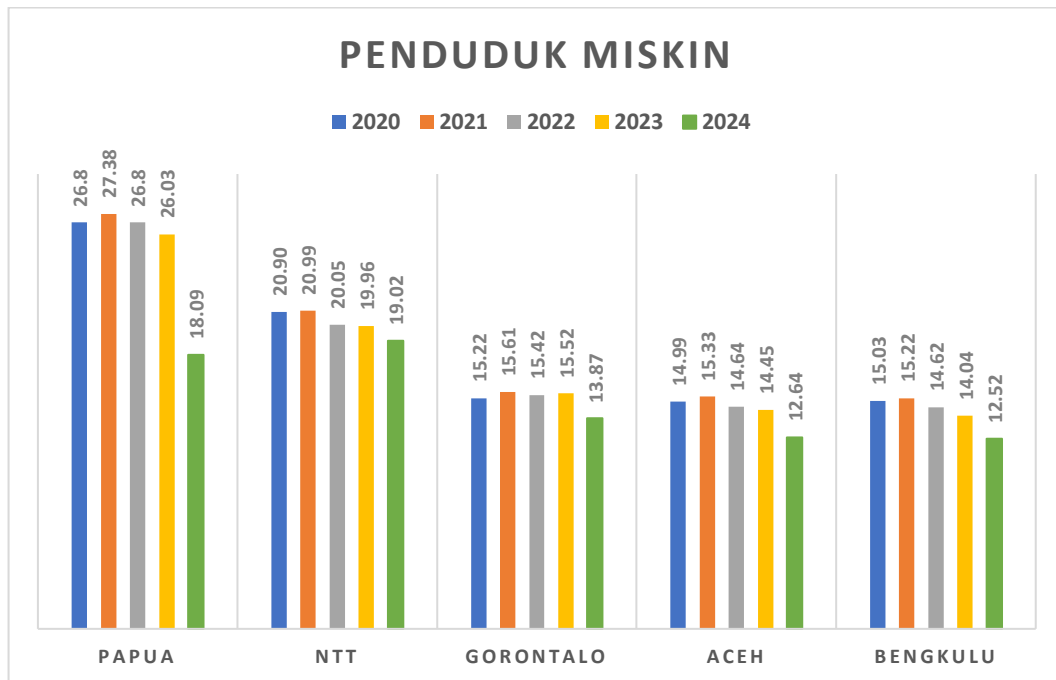
Provinsi	Jumlah Rata-Rata % 2015-2024
ACEH	15,3
SUMATERA UTARA	8,92
SUMATERA BARAT	6,35
RIAU	7,19
JAMBI	7,89
SUMATERA SELATAN	12,57

BENGKULU	15,07
LAMPUNG	12,33
KEP. BANGKA BELITUNG	4,82
KEP. RIAU	5,78
DKI JAKARTA	4,07
JAWA BARAT	7,93
JAWA TENGAH	11,49
DI YOGYAKARTA	11,95
JAWA TIMUR	10,88
BANTEN	5,81
BALI	4,28
NUSA TENGGARA BARAT	14,38
NUSA TENGGARA TIMUR	20,85
KALIMANTAN BARAT	7,28
KALIMANTAN TENGAH	5,25
KALIMANTAN SELATAN	4,54
KALIMANTAN TIMUR	6,11
KALIMANTAN UTARA	6,66
SULAWESI UTARA	7,67
SULAWESI TENGAH	13,02
SULAWESI SELATAN	8,89
SULAWESI TENGGARA	11,76
GORONTALO	15,96
SULAWESI BARAT	11,39
MALUKU	17,51
MALUKU UTARA	6,48
PAPUA BARAT	22,44
PAPUA BARAT DAYA	16,95
PAPUA	26,36
PAPUA SELATAN	19,35
PAPUA TENGAH	27,6
PAPUA PEGUNUNGAN	29,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa, Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, NTT, Papua Barat

Daya, Gorontalo, Aceh, Maluku, dan Bengkulu merupakan provinsi tingkat penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Namun khususnya di wilayah Papua, hanya provinsi Papua dan Papua Barat yang mempunyai data periode 2015-2024, sedangkan di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan tidak memiliki data lengkap pada periode 2015-2023. Sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan yang berkaitan dengan ketersediaan data pada setiap variabel yang digunakan, dalam proses penentuan wilayah penelitian, penulis menghadapi kendala berupa tidak meratanya publikasi data antarprovinsi, khususnya terkait dengan variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis menetapkan 5 provinsi sebagai objek penelitian, yaitu Papua, NTT, Gorontalo, Aceh, dan Bengkulu. Kelima provinsi ini dipilih karena memenuhi dua kriteria utama, yakni memiliki kelengkapan data yang memadai untuk seluruh variabel penelitian serta termasuk dalam kelompok provinsi dengan persentase penduduk miskin yang relatif tinggi di Indonesia. Adapun jumlah persentase penduduk miskin di 5 provinsi termiskin di Indonesia periode 2020-2024 seperti terlihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di 5 Provinsi Termiskin di Indonesia Periode 2020-2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Berdasarkan data pada gambar 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa 5 tahun terakhir Papua konsisten menjadi provinsi tingkat penduduk miskin yang tinggi yaitu sekitar 26,80% pada tahun 2020, lalu mengalami kenaikan hingga 27,38% pada tahun 2021. Menurut Jubi (2016), penyebab kemiskinan di Papua diduga minimnya infrastruktur yang terkait Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan hingga 18,09%, Penurunan angka kemiskinan ini dikarenakan adanya dukungan dan kerja sama serta komitmen dalam mengawal pelaksanaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, serta turunnya garis kemiskinan makanan dan non-makanan juga turut berdampak terhadap pengurangan persentase penduduk miskin (Antara News 2025; Data Books 2024).

Kemudian NTT menunjukkan kemiskinan relatif stabil sekitar 20,90% pada tahun 2020, dengan penurunan perlahan hingga 19,02% pada tahun 2024. Hasil survei Bappenas (2018), tingkat kemiskinan di provinsi NTT dipengaruhi oleh tingginya kerentanan wilayah terhadap bencana alam seperti kekeringan yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, ketergantungan yang besar pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu, proses penurunan jumlah penduduk miskin di kawasan Indonesia Timur cenderung berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat, sehingga tingkat kemiskinan di daerah tersebut relatif masih tinggi.

Sementara itu, Gorontalo memperlihatkan tingkat kemiskinan yang berfluktuasi, dimana persentase pada tahun 2020 sebesar 15,22%, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 15,61%, lalu pada tahun 2022 terjadi penurunan ke angka 15,42% dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan lagi ke angka 15,52%, setelah itu mengalami penurunan hingga 13,87% pada tahun 2024. Menurut Agus Sucipto *et.,al* (2024), menyatakan bahwa, tingginya angka kemiskinan di Gorontalo dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan pedesaan yaitu, terjadinya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) hal ini dikarenakan masyarakat pedesaan yang pada umumnya merupakan petani dan nelayan sehingga bertambahnya masyarakat miskin. Sementara itu, kondisi di Aceh juga menunjukkan fluktuasi dimana jumlah persentase pada tahun 2020 sebesar 14,99%, lalu terjadi peningkatan sebesar 15,33% pada tahun 2022 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 (Badan Pusat Statistik, 2024). Kemudian terjadi

penurunan secara bertahap ke angka 14,64% pada tahun 2022 hingga 12,64% pada tahun 2024. yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Selain di sebabkan oleh pandemi, Akbar (2025), menyatakan bahwa, kemiskinan di provinsi Aceh juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain dampak konflik yang terjadi pada masa lalu serta bencana tsunami tahun 2004 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya investasi pada sektor riil, serta belum meratanya Pembangunan infrastruktur turut menjadi faktor yang memperlambat proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Aceh. Fuadi (2024), mengatakan, kondisi ekonomi Aceh berpotensi semakin memburuk karena selama 16 tahun terakhir, alokasi dana Otsus Aceh cenderung minim berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian, dengan penekanan utama pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sementara pemberdayaan ekonomi, pengentasan ekonomi, penguatan sosial, perdamaian, serta penguatan keistimewaan mendapat porsi yang sangat terbatas.

Adapun Bengkulu menunjukkan penurunan kemiskinan dari sekitar 17,16% pada 2015 menjadi 12,52% pada 2024. Menurut Musianapedia (2025), provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan yang berdampak pada kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan, Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur yang belum berkembang secara optimal, seperti jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas publik lainnya.

Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat kemiskinan juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan akses tersebut adalah penggunaan telekomunikasi rumah tangga. Semakin luas pemanfaatan telekomunikasi, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan peluang ekonomi yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat cepat, sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet, telepon seluler, dan transformasi digital di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Andriani & Hasan (2025), menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, teknologi informasi di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam hal infrastruktur digital, *cloud computing*, kecerdasan buatan (AI), dan perbaikan layanan pemerintahan digital (*e-government*). Kemajuan ini telah mendorong perubahan substansial dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga komunikasi sosial masyarakat. Perkembangan ini juga ditunjukkan dengan kenaikan penggunaan internet di rumah tangga, pertumbuhan ekonomi digital, layanan keuangan digital, *e-commerce*, dan penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional di era digital.

Namun, perkembangan teknologi di Indonesia belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dan wilayah. Putra (2024), menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, khususnya di wilayah terpencil, terdepan, dan terluar. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, serta kondisi ekonomi yang kurang memadai menjadi penyebab utama ketimpangan akses teknologi. *Digital divide* mencerminkan perbedaan dalam akses dan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, pendidikan, dan sosial. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan optimal untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup mereka. Ketimpangan akses ini menyiratkan bahwa tantangan pengembangan teknologi di Indonesia masih besar untuk mencapai pemerataan pembangunan digital secara menyeluruh.

Di sisi lain, masalah dalam perkembangan teknologi di Indonesia juga terlihat dari rendahnya kualitas penggunaan teknologi di sejumlah daerah. Aminudin *et.,al* (2025), menyatakan bahwa transformasi digital masih terhambat oleh ketidakmerataan akses internet, perbedaan dalam perilaku digital masyarakat, serta tingginya risiko keamanan siber. Meskipun penetrasi internet terus meningkat, pemanfaatan teknologi lebih cenderung dalam konteks konsumtif daripada produktif, seperti dalam pendidikan digital, pengembangan usaha, pemasaran online, dan peningkatan keterampilan kerja. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara produktif mengakibatkan perkembangan teknologi tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan secara merata. Ini

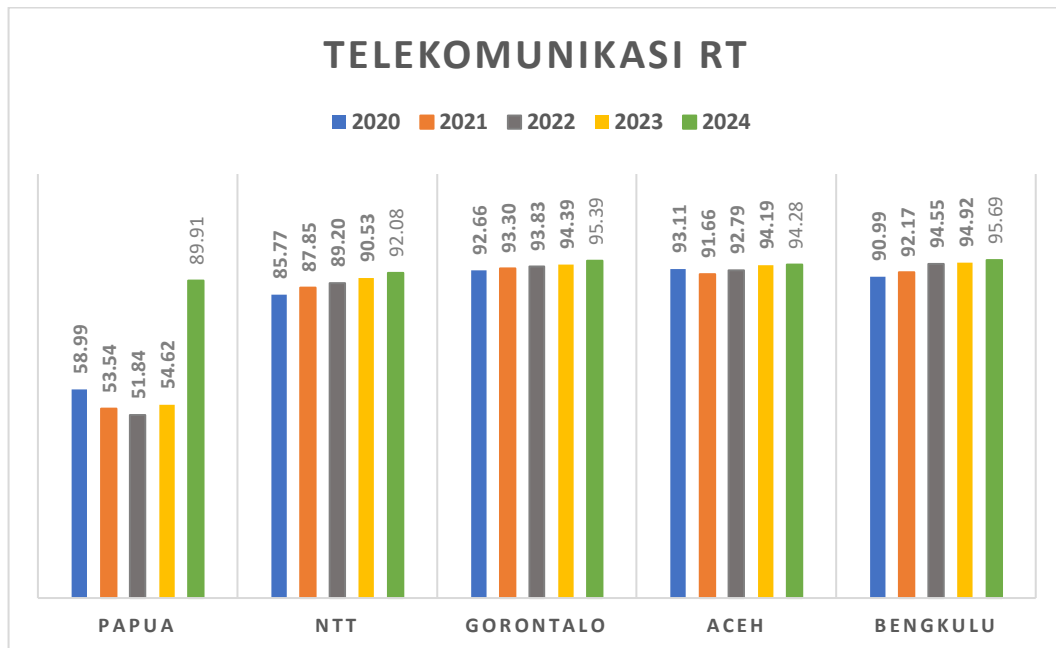
menunjukkan bahwa tantangan menghadapi perkembangan teknologi di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara efektif.

Selain itu, perkembangan teknologi menyajikan banyak tantangan besar bagi Indonesia dalam menghadapi era transformasi digital global. Amalia *et.,al* (2025) mencatat bahwa pemerataan teknologi dan pengembangan literasi digital adalah faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, terutama di pedesaan dan wilayah tertinggal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan di daerah tertinggal. Tantangan lain termasuk keterbatasan infrastruktur digital, biaya tinggi untuk pembangunan jaringan internet di lokasi terpencil, ancaman kejahatan siber, dan regulasi teknologi yang belum optimal. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, ketimpangan akses teknologi dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, seiring dengan perkembangan zaman teknologi, faktor-faktor seperti Penggunaan Telekomunikasi Rumah Tangga semakin berperan dalam memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena telekomunikasi dapat membuka peluang baru bagi rumah tangga untuk memperoleh informasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan sehingga berpotensi menurunkan kemiskinan, namun sebaliknya jika masyarakat tidak menggunakan teknologi dengan benar dan tepat maka akan semakin meningkatkan kemiskinan. Menurut Nedjar Malika (2022), teknologi

informasi berperan penting dalam mengurangi kemiskinan melalui perluasan akses informasi, pendidikan, layanan kesehatan, serta program konektivitas elektronik bagi masyarakat di daerah terpencil dan miskin. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah telah meningkatkan penggunaan internet, telepon, komputer dan televisi dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut yang didukung oleh berkembangnya belanja daring, program sosial, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan pembiayaan pemerintah bagi usaha kecil, turut berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada saat ini sangat diperlukan, karena salah satu faktor utama kegagalan dalam pengentasan kemiskinan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia yang mampu dalam pengelolaan teknologi dan kurangnya informasi yang didapatkan aplikasi TIK di seluruh sektor kehidupan masyarakat merupakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa (Syahriar, 2014). Hasil penelitian dari Saidu *et al.*, (2023), menunjukkan bahwa kepemilikan telepon rumah memiliki dampak positif dalam pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, kepemilikan telepon seluler, komputer di rumah, dan akses internet memiliki dampak yang sangat kuat terhadap pengentasan kemiskinan. Adapun jumlah penggunaan telekomunikasi rumah tangga di 5 provinsi termiskin di Indonesia periode 2020-2024 seperti terlihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1. 2 Pesrentase Penggunaan Telekomunikasi RT di 5 Provinsi termiskin di Indonesia Periode 2020-2024 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Berdasarkan data pada gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa penggunaan telekomunikasi rumah tangga di Provinsi Papua merupakan persentase terendah diantara Provinsi yang lainnya. Pada tahun 2020, penggunaan telekomunikasi rumah tangga sebesar 58,95%, kemudian mengalami penurunan menjadi 53,54% pada 2021 dan kembali menurun menjadi 51,84% pada 2022. Selanjutnya, pada 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 54,62%, dan pada 2024 meningkat sangat signifikan hingga mencapai 89,91%, ini disebabkan oleh peningkatan transformasi digital melalui pembangunan jaringan telekomunikasi nasional, seperti proyek BTS 4G, Palapa Ring, dan satelit SATRIA, yang bertujuan untuk memperluas konektivitas hingga wilayah tertinggal (Good Stats, 2024). Sementara itu, provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil selama periode penelitian. Tingkat penggunaan telekomunikasi rumah tangga meningkat

dari 85,77% pada 2020, menjadi 87,85% pada 2021, kemudian 89,20% pada 2022, 90,58% pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 92,08% pada 2024. Di Provinsi Gorontalo, tingkat penggunaan telekomunikasi rumah tangga juga berada pada kategori tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 92,66%, meningkat menjadi 93,30% pada 2023, 93,93% pada 2022, 94,59% pada 2023, dan mencapai 95,99% pada 2024.

Selanjutnya, Provinsi Aceh memperlihatkan perkembangan yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Tingkat penggunaan telekomunikasi rumah tangga pada 2020 sebesar 93,11%, kemudian meningkat menjadi 94,66% pada 2021, lalu mengalami penurunan menjadi 92,79% pada 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 94,19% pada 2023, dan mencapai 94,28% pada 2024. Adapun Provinsi Bengkulu juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Penggunaan telekomunikasi rumah tangga tercatat sebesar 90,59% pada 2020, kemudian meningkat bertahap menjadi 92,17% pada 2021, 94,55% pada 2022, 94,92% pada 2023, dan mencapai 95,69% pada 2024.

Permasalahan kependudukan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama terkait dengan tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat. Rizkina *et.,al* (2025), menjelaskan bahwa jumlah penduduk memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Semakin besar jumlah penduduk tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan dan peluang kerja, maka potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin juga semakin besar. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia setiap tahun menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lapangan kerja, pendidikan,

kesehatan, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya. Apabila pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan lapangan kerja yang memadai, maka risiko kemiskinan di masyarakat akan meningkat. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk yang banyak, tetapi juga dengan kemampuan negara dalam memberikan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat.

Selanjutnya, peningkatan jumlah penduduk juga memberikan tekanan tinggi terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Menurut Dewi *et.,al* (2025), pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja baru akan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan setengah pengangguran. Hal ini membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk kemiskinan, terutama di daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah. Akibatnya, sejumlah masyarakat menjadi rentan mengalami kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan yang memadai.

Masalah kependudukan di Indonesia juga terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Satria & Dewi (2025), mengemukakan bahwa pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, sementara pengangguran dan inflasi

berpengaruh positif. Sebagian besar penduduk di daerah tertinggal masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pelatihan kerja, sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Keadaan ini menyulitkan masyarakat untuk bersaing di pasar kerja modern dan berisiko terperangkap dalam siklus kemiskinan antargenerasi. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya kesempatan ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan kemiskinan masih tinggi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah dengan pembangunan yang belum merata.

Di sisi lain, Indonesia sekarang menghadapi bonus demografi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini berpotensi menjadi peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, asalkan penduduk usia produktif dapat diserap dalam lapangan kerja yang produktif dan berkualitas. Namun, jika peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan kerja, maka bonus demografi ini dapat berubah menjadi beban bagi pembangunan nasional. Tingginya angka pengangguran di kalangan penduduk usia produktif berpotensi meningkatkan kemiskinan, kriminalitas, ketimpangan sosial, serta menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi ancaman serius bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, karena dapat menghambat peningkatan produktivitas nasional dan memperbesar ketimpangan ekonomi.

Permasalahan kependudukan dan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks akibat ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Badan

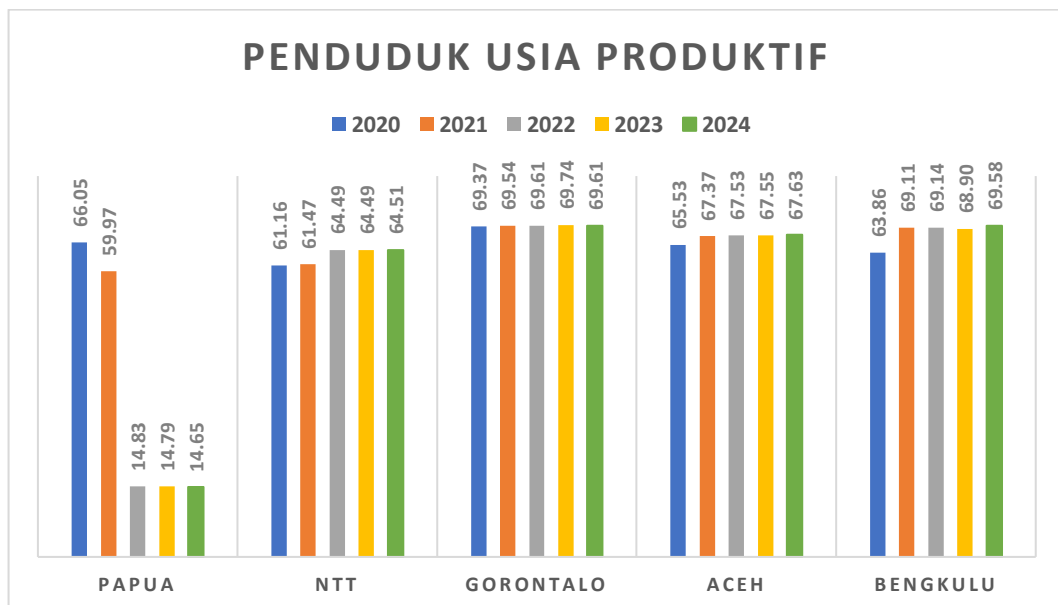
Pusat Statistik (2025), menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, teknologi, dan infrastruktur. Akibatnya, masyarakat pedesaan cenderung memiliki produktivitas dan tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan. Jika kondisi ini tidak ditangani secara serius, maka ketimpangan kesejahteraan antarwilayah akan semakin mencolok dan berpotensi memperburuk tingkat kemiskinan secara nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, kita dapat memahami bahwa permasalahan kependudukan di Indonesia sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Tingginya jumlah penduduk, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan masih menjadi isu serius di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas penduduk usia produktif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan akses pendidikan dan teknologi, serta menciptakan pemerataan pembangunan ekonomis agar jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal bagi pembangunan nasional, bukan justru menjadi faktor yang memperburuk kemiskinan masyarakat.

Selain itu, jumlah penduduk usia produktif seharusnya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan, karena kelompok usia ini memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi dan potensi peningkatkan kesejahteraan.

tingginya jumlah penduduk usia produktif seharusnya menjadi peluang bagi suatu daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja dan produktivitas. Namun, apabila penduduk usia produktif yang tersedia tidak terserap secara optimal dalam pasar kerja, kondisi tersebut justru dapat memperburuk kemiskinan karena meningkatnya jumlah pengangguran dan tingginya beban ketergantungan.

Dalam penelitian ini variable jumlah penduduk di operasionalisasikan melalui indikator proporsi usia produktif (15-64 tahun) terhadap total penduduk pada suatu wilayah dan periode tertentu. Indikator ini dipilih karena kelompok usia produktif merupakan representasi dari potensi tenaga kerja secara langsung berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan pendapatan rumah tangga. Adapun jumlah penduduk usia produktif di 5 provinsi termiskin di Indonesia periode 2020-2024 seperti terlihat pada Gambar 1.3 berikut:



Gambar 1. 3 Persentase Penduduk Usia Produktif di 5 Provinsi Termiskin di Indonesia Periode 2020-2024 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Berdasarkan data pada gambar 1.3 di atas dapat kita lihat, Papua menunjukkan perubahan yang paling mencolok dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 66,05%, kemudian menurun menjadi 59,97% pada 2021. Selanjutnya, pada 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 14,83%, kemudian sedikit menurun menjadi 14,79% pada 2023, dan 14,65% pada 2024, hal disebabkan oleh pemekaran wilayah administratif yang memecah provinsi menjadi beberapa provinsi baru. Oleh karena itu terjadi redistribusi data penduduk, dimana sebagian besar penduduk usia produktif tercatat di provinsi baru seperti Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan lainnya (Databooks, 2026). Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari 61,16% menjadi 61,47% pada 2021, kemudian 64,49% pada 2022, 64,49% pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 64,51% pada 2024. Di Provinsi Gorontalo berada pada tingkat yang relatif tinggi dan stabil. Pada 2020 sebesar 69,37%, meningkat menjadi 69,54% pada 2021, kemudian 69,61% pada 2022, 69,78% pada 2023, dan mencapai 69,84% pada 2024.

Selanjutnya, Provinsi Aceh juga menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase penduduk usia produktif meningkat dari 65,93% pada 2020 menjadi 67,27% pada 2021, kemudian 67,55% pada 2022 dan 2023, lalu meningkat menjadi 67,69% pada 2024. Di Provinsi Bengkulu relatif stabil dan meningkat dari 59,89% menjadi 69,58% pada 2024. Adapun Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten selama periode penelitian. Pada 2020, persentase penduduk

usia produktif sebesar 63,96%, meningkat menjadi 65,11% pada 2021, kemudian 65,90% pada 2022, sedikit menurun menjadi 65,89% pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 66,58% pada 2024.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta karakteristik demografi memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian Paputungan *et al.* (2025), menemukan bahwa jumlah penduduk usia produktif berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, yang berarti peningkatan proporsi usia produktif mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan partisipasi ekonomi. Sejalan dengan itu, Kordilia & Kartika Yudha (2024), menunjukkan bahwa akses internet dan penggunaan perangkat digital seperti laptop berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan akses informasi dan peluang ekonomi. Temuan ini juga diperkuat oleh Bergantino *et al.*, (2025), yang menyatakan bahwa TIK berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di berbagai negara, serta Widiyastuti (2015), yang menemukan bahwa peningkatan penetrasi internet dan telepon seluler secara konsisten mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Namun demikian, di balik dominannya temuan yang menunjukkan pengaruh negatif TIK dan penduduk usia produktif terhadap kemiskinan, masih terdapat potensi perbedaan hasil empiris yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa studi mengindikasikan bahwa pemanfaatan TIK tidak selalu optimal dalam menurunkan kemiskinan, terutama ketika terjadi kesenjangan akses (*digital divide*), rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan kemampuan dalam

memanfaatkan teknologi secara produktif. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga tidak selalu berdampak positif apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, yang justru dapat meningkatkan pengangguran dan memperburuk kondisi kemiskinan.

Perbedaan temuan tersebut mencerminkan adanya *research gap*, terutama karena sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan variabel yang bersifat umum, seperti TIK secara agregat dan jumlah penduduk secara keseluruhan, tanpa secara spesifik mengkaji penggunaan telekomunikasi pada tingkat rumah tangga dan proporsi penduduk usia produktif sebagai indikator yang lebih representatif. Selain itu, keterbatasan lainnya terletak pada penggunaan data dengan cakupan wilayah yang luas atau sebaliknya terlalu sempit, serta periode pengamatan yang relatif terbatas sehingga belum mampu menangkap dinamika perubahan sosial ekonomi, khususnya sebelum, saat, dan setelah percepatan transformasi digital yang dipicu oleh pandemi COVID-19.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa pengaruh penggunaan telekomunikasi rumah tangga dan penduduk usia produktif terhadap kemiskinan masih memerlukan pengkajian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih spesifik dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis kedua variabel tersebut secara simultan dalam satu model, menggunakan indikator yang lebih representatif, serta difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel pada lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia selama periode 2015–2024, sehingga

diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual, akurat, dan berkelanjutan mengenai hubungan antara penggunaan telekomunikasi rumah tangga, penduduk usia produktif, dan kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Penggunaan Telekomunikasi Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat di disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Penggunaan Telekomunikasi Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di lima provinsi termiskin di Indonesia?
2. Seberapa besar Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Kemiskinan di lima provinsi termiskin di Indonesia?
3. Seberapa besar Penggunaan Telekomunikasi Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Usia Produktif secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan di lima provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengaruh Penggunaan Telekomunikasi Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di lima provinsi termiskin di Indonesia.

2. Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Kemiskinan di lima provinsi termiskin di Indonesia.
3. Mengetahui Pengaruh Penggunaan Telekomunikasi Rumah Tangga dan Jumlah Usia Produktif secara simultan terhadap Kemiskinan di lima provinsi termiskin di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, dengan memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik serupa, terutama yang berkaitan dengan penggunaan telekomunikasi rumah tangga dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, khususnya melalui peningkatan akses dan pemanfaatan telekomunikasi serta Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) di masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan telekomunikasi secara produktif, terutama dalam meningkatkan akses informasi, peluang kerja, dan kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait telekomunikasi, penduduk usia produktif, dan kemiskinan, baik dengan menggunakan metode maupun variabel yang berbeda.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam menerapkan teori ekonomi ke dalam penelitian empiris, khususnya dalam pengolahan data dan analisis masalah sosial ekonomi di Indonesia.